

EKONOMI KERAKYATAN PEMIKIRAN MOHAMMAD HATTA SERTA IMPLIKASINYA

Akhmad Suyono

Universitas Islam Riau

Akhmad@edu.uir.ac.id

Abstrak

Kajian ini berfokus pada pembahasan kasus ekonomi kerakyatan pada masa krisis ekonomi 1998, ketika Orde Baru berperan membantu usaha mikro, UKM dan koperasi. Penting bagi negara memahami penguasaan atas kepentingan hidup rakyat banyak, dan tatanan pemerintahan memahami apa yang terdapat di bumi dan air, serta menggunakannya untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Penulisan artikel ini bertujuan untuk mendefinisikan apa yang dipikirkan ekonomi Islam tentang perekonomian nasional dalam kaitannya dengan pemikiran Mohammad Hatta dan Indonesia. Metodologi dalam tulisan ini adalah kualitatif studi kepustakaan. Hasil tinjauan pustaka ini menunjukkan bahwa pemikiran ekonomi kerakyatan ini relevan dengan kehidupan masyarakat sehari-hari. Jika aturan seperti ini terbukti membuahkan hasil, secara otomatis pemerintahan telah menunaikan segala kewajibannya dalam memakmurkan suatu tatanan masyarakat.

Kata Kunci: Ekonomi rakyat, Mohammad Hatta.

PENDAHULUAN

Pembahasan ekonomi kerakyatan tidak lepas dari Bung Hatta. Seorang proklamator, ekonom, dan pejuang, Bung Hatta tidak hanya membantu menginternalisasikan konsep ini untuk menyelenggarakan negara yang merdeka secara konstitusional. Pemikirannya juga berperan sangat penting dalam meletakkan dasar bagi terwujudnya ekonomi yang berbasis ekonomi kerakyatan. Beliau menegaskan bahwa di Indonesia, kemakmuran rakyat lebih penting dari pada kepentingan rakyat. Kesejahteraan suatu tatanan rakyat menjadi tujuan utama pembangunan.

Kasus ekonomi maupun pembangunan ekonomi layak untuk dibahas. Dan yang tercipta adalah ekonomi kerakyatan, terbukti ekonomi

nasional berperan membantu usaha kecil menengah (UKM) dan koperasi pada masa krisis ekonomi 1997 dan 1998. Tapi sekarang situasinya berbeda dan banyak koperasi yang mati. Perekonomian Indonesia telah mengalami tiga kali kelesuan ekonomi yang berdampak pada melambatnya pertumbuhan ekonomi. Ketika situasi ekonomi memburuk, para ekonom dan pengamat terutama pejabat pemerintah berupaya menjadikan usaha kecil sebagai penyelamat perekonomian nasional. Namun pada kenyataannya, kita bersembunyi dalam ekonomi liberal dan melupakan ekonomi nasional. Fokus utama dari kajian ini adalah untuk membahas dan menganalisa pemikiran Mohammad Hatta tentang perekonomian nasional dan relevansinya di Indonesia.

METODOLOGI PENELITIAN

Jenis kajian ini termasuk studi kualitatif literatur. Studi kualitatif lebih menekankan pada makna daripada generalisasi. Pendekatan dalam tulisan ini ialah pendekatan normatif, yakni studi ekonomi normatif. Data informasi empiris dimaksudkan untuk mempertajam analisa dan menguatkan argument. Desain studi ini ialah studi fenomenologis yang bertujuan mengidentifikasi “esensi” yang terpaut dengan suatu fenomena yang ditafsirkan. Kajian ini mengaitkan studi tentang sebagian kecil subyek melalui keterlibatan yang panjang dan ekstensif. Sumber data dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan dari buku-buku yang ada dan berbagai media yang tersedia baik *offline* maupun *online*. Data deskriptif tentang pemikiran Bung Hatta dari berbagai sumber sastra ditransformasikan untuk dipadukan dengan teks dan pembahasan. Setelah data terkumpul, langkah selanjutnya adalah melakukan analisis. Teknis deskriptif mengacu pada prosedur analitis yang mendeskripsikan pemikitan tokoh ekonomi kerakyatan.

PEMBAHASAN

1. Demokrasi dalam Perekonomian

Pemahaman Bung Hatta tentang istilah kedaulatan rakyat dan demokrasi bukanlah demokrasi yang dipraktikkan di negara-negara Barat. Hatta menganalisis apakah revolusi Prancis tahun 1789 yang dikenal sebagai sumber demokrasi Barat belum mewujudkan *trilogy la Liberte, l' Egalite et la Fratrenite* (kebebasan, persamaan dan persaudaraan) yang

menjadi semboyannya. Menurutnya, revolusi Prancis dimulai sebagai revolusi individu untuk membebaskan rakyat dari belenggu sistem feodal yang mengutamakan kemerdekaan rakyat. Menyadari hal tersebut, masyarakat tidak lupa untuk bersatu dalam kesetaraan dan persaudaraan. Namun, hanya karena Hatta menolak demokrasi ala Barat, bukan berarti ia menerima Uni Soviet, negara komunis yang disebut 'Demokrasi Rakyat'. Dalam masyarakat desa adat Indonesia, tanah adalah milik desa, bukan milik rakyat. Seseorang dapat memanfaatkan tanah kosong itu sebaik-baiknya untuk kebutuhan keluarganya, tetapi ia tidak dapat menjualnya. Saat itu, tanah itu milik masyarakat, bukan milik rakyat. Tinjauan saya tentang demokrasi ekonomi untuk menciptakan keadilan sosial tidak diragukan lagi telah mempengaruhi pemikiran ekonomi Hatta baik dalam pemikiran ekonomi makro maupun mikro.

2. Ekonomi Rakyat untuk Mohammad Hatta

“Ekonomi rakyat terancam,” tulis Mohammad Hatta, salah satu pendiri Republik Indonesia. Artikel ini menjadi dasar bagi konsep ekonomi kerakyatan sebagai penyeimbang untuk mengatasi sistem ekonomi kolonial Belanda yang didukung oleh golongan bangsawan dalam sistem feodal dalam negeri dan beberapa partai politik sipil asing yang menentang partai kolonial Belanda. Upaya untuk menghapus sistem kolonial ini menjadi tujuan utama sistem ini.

Koperasi adalah kata majemuk

dari 'ko' yang berarti bersama dan 'operation' yang berarti bekerja. Jadi koperasi adalah bekerja sama. Perkumpulan yang disebut koperasi adalah koperasi untuk mencapai tujuannya. Tidak ada anggota dalam koperasi yang bekerja sama secara penuh untuk mencapai tujuan bersama. Koperasi menumbuhkan demokrasi yang berakar pada hidup dengan rasa tanggung jawab untuk kehidupan yang demokratis. Sesuai dengan prinsip kolektivisme ini, manajer tidak menerima pendapatan dalam koperasi. Hanya karyawan penuh waktu yang menerima penghasilan harian. Dia (manajemen koperasi) hanya menerima biaya perjalanan dan hukum yang dibebankan ketika dia muncul di pengadilan. Di sisi lain, masa percobaan hanya dapat digunakan seminggu sekali selama 2 minggu, dan dapat ditangguhkan jika terjadi keadaan darurat.

Dengan kebijakan kolektivis, Hatta berpendapat bahwa koperasi merupakan bentuk ideal bagi pembangunan. Bagi Hatta, perkembangan koperasi tidak dimulai dari profesor, dokter, orang kaya, dan orang pintar lainnya yang sudah memiliki kebijakan hidup bahagia untuk dirinya dan keluarganya. Bagi Hatta, perkembangan koperasi dimulai dari buruh miskin, petani miskin, dan pengrajin miskin. Mereka terpesona dengan cita-cita koperasi yang digambarkan oleh orang-orang pintar yang ingin membawa kemakmuran, tetapi memahami bahwa jika perkembangan koperasi tidak diharapkan, perkembangan koperasi

akan menjadi hasil dari orang-orang kaya dan dermawan.

Rivewnya, jika koperasi adalah tujuan utama untuk mengatur kebutuhan hidup bersama sejauh mungkin, dan untuk memperbaiki nasib ekonomi lemah melalui kerjasama. Dalam menjelaskan tujuan koperasi, Hatta membandingkan tusuk sate, sejenis tusuk sate antar orang. Ibarat tusuk sate itu mudah patah saat di letakkan sendiri. Tetapi ketika banyak dan diikat begitu kuat, itu adalah ikatan kokoh, sehingga sulit untuk memutuskannya. Berbeda dengan korporasi biasa yang mencari laba, koperasi tidak mencari keuntungan seperti korporasi. Koperasi pada akhirnya menghasilkan laba, tetapi laba itu bukanlah tujuan. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, bentuk koperasi adalah untuk memenuhi kebutuhan rakyat kecil. Mendapatkan kebutuhan hidup dengan biaya minimal, tujuan seperti itu bukanlah keuntungan.

KESIMPULAN

Berdasarkan beberapa literatur dan pembahasan di atas maka dapat di ambil beberapa kesimpulan;

1. Demokrasi yang berkedaulatan menurut pandangan Hatta yaitu rakyat memiliki hak yang sama dalam hal berekonomi. Oleh karnanya segala upaya pemerintah diarahkan untuk kesejahteraan dan kemaslahatan dari sebahagian besar masyarakat.
2. Kebijakan pemerintah dalam mendorong terciptanya masyarakat yang berkeadilan dan makmur perlu mendapat dorongan dari berbagai pihak. Terutama yang terlibat

langsung dalam perekonomian seperti, UMKM dan koperasi

SARAN

1. Para ahli ekonomi terus menggali gagasan-gagasan ekonomi para pemikir Indonesia dalam upaya mengkonseptualisasikan dan menerapkannya.
2. Pemerintah sebagai *founding father* Indonesia harus mempertimbangkan kembali pandangan Hatta terhadap perekonomian. Ide-idenya seperti vitalisasi dan penyelesaian koperasi, akses ke milik negara untuk kepentingan masyarakat, dan kesejahteraan rakyat diciptakan kembali. Secara khusus, pola pikir Hatta adalah kewajiban bagi penulis dan pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menghormati dan mengikuti pola pikir beliau.
3. Dimasa datang diharapkan paradigma Mohammad Hatta ini terus berkembang bila diperlukan dibandingkan dengan para pemikir ekonomi lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Anonim. 2002. *Kumpulan pidato II*. Jakarta: PT Toko Gunung Agung.
- Arief, Sritua. 2002. *Ekonomi kerakyatan indonesia; mengenang bung hatta, bapak ekonomi kerakyatan indonesia*. Surakarta: Muhammadiyah University Press.
- Farida Swasono, Meutia. 1980. *Bung Hatta, pribadinya dalam kenangan*. Jakarta Sinar Harapan Bekerja sama dengan Universitas Indonesia.
- Hatta, Mohammad. 1971. *Koperasi membangun dan membangun koperasi*. Jakarta: PT. Koperasi Pegawai Negeri Jakarta Raya.
- Hatta, Mohammad. 1981. *Pengantar ke jalan ekonomi perusahaan*. Jakarta: Mutiara Offset.
- Sideman, Zulfikri. 2002. *Demokrasi untuk indonesia*. Jakarta: PT Kompas Media Nusantara.
- Suma, M. Amin. 2008. *Menggali akar mengurai serat ekonomi dan keuangan islam*. Ciputat: Kolam Publishing.
- Swasono, Edi. 2002. *Bung Hatta bapak kedaulatan rakyat*. Jakarta: Yayasan Hatta.